

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu dari beberapa cara yang tepat untuk mendapatkan mutu sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan adalah melalui jalur pendidikan. Pendukung utama bagi tercapainya maksud dan sasaran tersebut, adalah melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, di bawah bimbingan dan pembinaan tenaga kependidikan yang profesional serta implementasi dukungan seluruh komponen manajemen mutu secara terpadu.

Dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, di dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Pendidikan memainkan peranan penting sekali, terutama dalam hal mempersiapkan peserta didik menjadi tokoh IPTEK yang mampu menampilkan keunggulan dirinya sebagai sosok yang tangguh, kuat, kreatif, mandiri, dan

profesional pada bidangnya masing-masing. Namun perlu menjadi pembahasan bahwa masalah mutu pendidikan kini sedang menjadi isu nasional, yang urgensinya tidak bisa diabaikan. Banyak aspek yang berkontribusi terhadap mutu pendidikan, diantaranya yang sangat penting adalah ketersediaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif dalam menunjang pembelajaran, termasuk di dalamnya dukungan infrastruktur perkotaan yang representatif.

Keberhasilan dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan, guna tercapainya hasil sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing, sangat dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti : kurikulum, peserta didik, manajemen pendidikan, tenaga pendidik, dan perangkat fasilitas pendidikan. Di samping itu juga, faktor-faktor lain yang berhubungan lingkungan pendidikan, juga memberi pengaruh dalam mewujudkan hasil proses pendidikan yang baik, seperti pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

Tak bisa dihindari kenyataan kondisi pendidikan di Indonesia yang dihadapkan permasalahan yang dominan seperti yang pernah dikemukakan oleh Dr. Yahya A. Muhaimin antara lain: Masih rendahnya perolehan pendidikan merata, mutu dan relevansi pendidikan yang rendah, dan manajemen pendidikan yang masih lemah (Jalal, 2001). Kondisi tersebut memang sangat jelas sekali dapat kita lihat dan rasakan, terlebih pada permasalahan masih lemahnya Manajemen Pendidikan.

Manajemen Pendidikan di beberapa pembahasan sering disamakan dengan maksud dari Administrasi Pendidikan, yang mempunyai beberapa pengertian oleh beberapa pakar, seperti halnya Banghart dan Trull (1973:106) mengemukakan bahwa : “Adminsitration pendidikan sebagai sistem dari sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.

Sejalan dengan hal tersebut, Purwanto (2007:3) menjelaskan bahwa : ”Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan”. Dari hal tersebut jelas dapat diketahui bahwa bahwa administrasi pendidikan merupakan rangkaian proses kerjasama sejumlah orang atau melalui upaya-upaya dan langkah bersama dari orang-orang dengan segenap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis.

Dari definisi-definisi tersebut jelaslah bahwa administrasi dijalankan sebagai proses yang terdiri dari berbagai fungsi yang berkaitan. Fungsinya yang paling kritis dalam sistem pendidikan umumnya dan sekolah secara khusus, berpusat pada administrasi program pendidikan, administrasi murid, administrasi personil, administrasi keuangan, dan administrasi pelayanan-pelayanan dukungan. Pelayanan dukungan dimaksud meliputi pelayanan-pelayanan perpustakaan,

bimbingan, kesehatan, dan keamanan, kafeteria, pemeliharaan fasilitas fisik, transportasi, kantor, dan hubungan sekolah-masyarakat.

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel, dimulai dari kualitas guru sampai dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sehubungan dengan itu maka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sekolah perlu ditingkatkan melalui upaya pembangunan prasarana pendidikan. Hal ini membuat pemenuhan prasarana penunjang pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak, karena adanya pertimbangan hubungan dengan kualitas pendidikan.

Berdasarkan konsep dan teori tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Manajemen atau dengan istilah Administrasi Pendidikan, dibutuhkan proses usaha bersama orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Administrasi pendidikan sebagai rangkaian sistem yang berhubungan erat dengan suatu institusi pendidikan, yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan atau proses dan kerjasama sejumlah orang dengan mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan secara optimal.

Dalam arti yang luas, administrasi pendidikan mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dan satuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan. Maksudnya di sini adalah diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mendukung terlaksananya rangkaian Sistem Pendidikan tersebut, sebagaimana yang menjadi tujuan. Untuk itu segala aspek yang berhubungan dan mendukung pendidikan yang efektif dan efisien harus dapat dilaksanakan. Aspek

tersebut tentunya berbagai macam bentuk, dimulai dari kondisi administrasi, kelembagaan, legalitas dan termasuk didalamnya aspek sarana dan prasarana.

Prasarana dan sarana merupakan bentuk bangunan dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia agar dapat hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas, dengan kondisi agar manusia tersebut dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya (Depkimpraswil, 2002). Peran sarana dan prasarana di sini adalah menjadi mediator antara sistem dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Arum (2007:5) menjelaskan bahwa :

”Sarana dan Prasarana diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggerakannya. Begitu pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana menjadi sangat penting karena dibutuhkan. Sarana pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga pendidikan dan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri”.

Seperti hanya dalam kegiatan suatu organisasi, maka diperlukan manajemen. Pada prinsip dasarnya, manajemen adalah sama pentingnya dengan pengurusan dan pengelolaan. Karena itu, manajemen sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung pendidikan yang juga mendukung pembangunan nasional. Dengan diberlakukan kemandirian pengelolaan sendiri atau otonomi, pemerintah memberi peluang kepada pihak sekolah untuk bekerja sesuai

kemampuan masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, di samping pemerintah sendiripun mempunyai tanggung jawab besar dalam regulasi dan pelaksanaan kebijakan yang lebih makro dalam konsep manajemen ini.

Dalam dunia pendidikan, kata kunci prasarana dan sarana tak dapat dilepaskan dengan sekolah. Karena pada kondisi formal, sekolah menjadi pusat mediator terjadinya interaksi antara guru sebagai pengajar dan murid sebagai peserta belajar. Disanalah diharapkan akan terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dari guru sebagai nara sumber dan murid sebagai penerima ilmu.

Berbicara mengenai standar sarana dan prasarana untuk setiap satuan pendidikan, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Karena begitu sangat pentingnya arti sekolah, maka dalam usaha menyediakan prasarana dan sarana pendidikan (sekolah), dituntut untuk lebih akurat, rasional, efektif, efisien, akuntabel dan berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang akan muncul dan yang sudah muncul sebelumnya, bahkan sampai berdirinya sebuah sekolah. Mengingat sekolah

sebagai pusat interaksi dari dan di antara beberapa komunitas pendidik, maka sangat dimungkinkan akan menjadi pusat berkumpulnya beberapa komunitas yang berasal dari berbagai wilayah di sekitarnya, atau bahkan berada jauh dari lokasi sekolah tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang ada telah menciptakan berbagai aktivitas masyarakat dalam kondisi yang sangat kompleks. Hal ini pula yang pada implementasinya sangat berhubungan dengan posisi sekolah terhadap aktivitas tata guna lahan lainnya. Seperti yang dikemukakan Sa'ud dan Makmun (2006:70) :

”Pada bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang menyangkut posisi, letak dan ukuran pendirian suatu sekolah. Hal ini menjadi penting karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dengan masalah-masalah di lingkungan, seperti ketersediaan SDM, sosial budaya, ekonomi, dan politik.”

Lebih lanjut lagi Sa'ud dan Makmun (2006:85) menjelaskan bahwa:

”Pendidikan merupakan suatu sistem. Di dalam sistem terdapat berbagai proses yang kemudian membentuk sub-sub sistem. Proses-proses tersebut terjadi di dalam suatu lingkungan yang kemudian disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan secara luas inilah yang merupakan bidang telaah masalah perencanaan pendidikan. Suatu perencanaan pendidikan yang komprehensif akan berurusan dengan keseluruhan proses pendidikan, termasuk di dalamnya sub-sub sistem di dalam sistem pendidikan.”

Sa'ud dan Makmun (2006:85) membagi sistem dalam lingkungan pendidikan yang secara garis besarnya menjadi 4 (empat) sistem. Keempat sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem pendidikan, yaitu : 1) Sistem aktivitas pendidikan; 2) Sistem komunikasi pendidikan; 3) Sistem fasilitas pendidikan, dan 4) Sistem operasi pendidikan.

Dari konsep tersebut jelas bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Walaupun disadari bahwa sampai dengan saat ini masih sangat dirasakan terbatasnya kajian yang secara riil membahas tentang sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembelajaran, seperti halnya dengan ketersediaan bangunan sekolah yang baik, lingkungan yang mendukung serta pergerakan siswa dari dan ke sekolah melalui sistem transportasi, jalan dan kondisi lalu lintas yang representatif, serta kondisi tata guna lahan di sekitar sekolah yang baik pula.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Lahan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat”.

Untuk pencapaian sasaran yang ada, maka penyediaan minimal fasilitas pendidikan yang diperlukan suatu kota harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai pada tingkatan pendidikan menengah. Penyediaan fasilitas pendidikan tersebut selain dapat disediakan oleh pemerintah, juga dapat didukung oleh pihak lain.

Dalam membangun manusia unggul, harus berangkat dari konsep dasar dan filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menata pendidikan sejak dini merupakan sesuatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan baik, baik itu dari bangunannya, fasilitas belajar, maupun buku serta gurunya, maka baiklah



selanjutnya. Kondisi sekolah yang bermutu dan sehat akan memicu gairah belajar anak. Mereka akan menganggap sekolah sebagai wahana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Sekolah dapat berubah menjadi tempat yang memikat bukan sebaliknya, membuat siswa tidak betah bahkan takut.

Menciptakan kondisi sekolah yang ideal seperti hal tersebut berarti sudah dimulai membangun pondasi kokoh dalam pengembangan SDM. Mengamalkan hasilnya tidak serta merta dapat terlihat dalam lima sampai enam tahun ke depan. Tapi jelas telah dimulai menciptakan generasi unggul karena hitungan investasi besar SDM ini akan kelihatan hasilnya pada generasi berikutnya.

Untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata, mulai dari jenjang dasar dan menengah yang terjangkau bagi semua penduduk, melalui pendidikan formal SD sampai SLTA atau bentuk pendidikan lainnya yang sederajat, perlu sebuah perencanaan spasial yang matang, dengan mengaitkan pembangunan lokasi sekolah yang aksesibel, berada dalam dijangkau yang mudah dan kondusif bagi terciptanya proses belajar mengajar.

Untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat. Di dalam peraturan ini, diatur dan dibahas tentang ketentuan sarana dan prasarana, bangunan, lahan dan satuan pendidikan itu sendiri.

Berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, tentu bukan hanya sebatas gedung saja. Banyak hal yang perlu dibahas dalam kaitan bagian dari kebutuhan pendidikan tersebut. Isu strategis yang sekarang ini sering dihadapkan adalah ketika permasalahan sekolah dihadapkan dengan tata ruang wilayah di sekitarnya. Keberadaan sekolah dituntut untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sementara kondisi tata ruang wilayah tidak dapat memberikan kondisi yang baik. Sehingga kadang tidak heran terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, seperti ucapan yang menggambarkan sekolah yang membuat kota jadi padat dan macet, atau sebaliknya kondisi perkotaan yang padat dan macet tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Inilah konsekuensi logis pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan akan pembangunan kewilayah. Sehingga sering dihadapkan permasalahan seperti intensitas sekitar sekolah yang padat mengganggu aktivitas belajar, sekolah yang bertumpuk jumlahnya di tengah kota, namun minim jumlah di daerah pinggiran, atau senjang dalam ketersediaan antara jumlah sekolah dengan permintaan oleh jumlah siswa.

Dari permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa memikirkan sarana dan prasarana pendidikan adalah tidak dapat berdiri sendiri di suatu kewilayahan. Sarana pendidikan tersebut pasti akan berhubungan, terpengaruh atau mempengaruhi fasilitas-fasilitas sarana prasarana non pendidikan yang lain secara

spasial. Dalam membuat sebuah perencanaan penataan wilayah sebuah kota misalnya, dalam menentukan letak / lokasi sarana dan prasarana harus mempertimbangkan efisien, efektif dan dampak dari penentuan sebuah lokasi.

Seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 44 ayat (4) disebutkan bahwa "Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut". Lebih lanjut di dalam ayat (5) juga ditentukan bahwa "Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan".

Selain hal tersebut di atas, dalam menentukan lokasi sarana pendidikan juga harus mempertimbangkan pengembangan wilayah, kedudukan lokasi sarana pendidikan terhadap sarana perkotaan lainnya, fasilitas pendukung, akses, transportasi, dan lain-lain. Lokasi suatu sarana pendidikan sangat erat kaitannya dengan jaringan jalan, yang merupakan jalur transportasi yang menghubungkan antara sarana pendidikan tersebut dengan lokasi-lokasi tertentu di sekitarnya. Dalam hal ini jaringan jalan yang menghubungkan antara sarana pendidikan dengan lokasi pemukiman atau sumber bangkitan perjalanan lainnya, haruslah berdaya guna dan berhasil guna serta mampu menampung seluruh volume kendaraan yang ada serta dapat digunakan oleh para pengguna jalan dengan baik.

Seperti yang dijelaskan oleh Herawan dan Nasihin (Tim Dosen Adpen UPI, 2005:123), bahwa :

”Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama oleh setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti; gedung, ruangan belajar/kelas, alat-alat/media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti; halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju sekolah”.

Lebih lanjut Sutisna (1989:37) menjelaskan studi yang sangat komprehensif yang dikembangkan oleh Program Kerjasama Negara-negara Bagian Selatan Amerika Serikat, dalam usaha mendefinisikan suatu “Pola Kemampuan dalam Administrasi Pendidikan”. Pola kemampuan ini dibangun menjadi delapan bagian bidang tugas pokok, dengan masing-masing bidang diperinci lagi menjadi sejumlah tugas administratif yang terpisah. Salah satu tugas pokok penting tersebut adalah gedung sekolah dan angkutan sekolah.

Lebih lanjut Stueck dan Tanner (1996) mengungkapkan di dalam tulisannya :

*“We contend that the design of school facilities is just as important as the design of the curriculum. How many of you as curriculum or administrative personnel have considered yourself as the architect of the learning environment? Here is the fundamental way of thinking about learning experiences: Consider the educational needs of the students, the transportation needs, and the other basic needs of the students; then design a "place" for educational experiences.”*

Selanjutnya, secara fokus membahas kaitannya prasarana transportasi sebagai bagian dari infrastruktur perkotaan dalam menunjang Efektivitas pendidikan, Banghart dan Trull (1973:125-127) mengemukakan sistem pergerakan pendidikan (*Educational Movement System*), dimana dalam perencanaan fasilitas fisik pendidikan dan kebutuhan sekolah, transportasi merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan. Sistem pergerakan pendidikan ini menjadi motivator penting/utama bagi penetapan lokasi untuk berbagai aktifitas pendidikan dan memungkinkan pergerakan pelajar dan yang lainnya dalam berbagai bagian pada area pendidikan. Perencanaan pergerakan ini mempengaruhi perencanaan area lainnya dan perlu dipertimbangkan seberapa besar pengaruhnya. Tujuan pendidikan dan kebutuhan pendidikan harus menjadi faktor utama dalam penetapan bentuk, struktur dan cara kerja/operasi dari sistem pergerakan. Akibat melayani beberapa fungsi, pergerakan ini membentuk struktur dasar sekolah dan menghubungkannya secara campur baur dengan berbagai sistem aktivitas yang beragam, sebagaimana sistem transportasi dari sebuah kota.

Hal lain yang sangat terkait dalam bahasan ini adalah bahwa pergerakan penuh dengan pengalaman orang-orang di perkotaan. Setiap hari siswa memulai pengalaman belajar siswa dengan pergerakan / perjalanan untuk pergi ke pusat pembelajaran (maksudnya dari rumah ke sekolah). Namun pengalaman ini tidak dijadikan sebagai bagian dari program pendidikan, baik secara formal maupun

informal. Akibatnya, individu tidak peduli terhadap kekacauan, kemacetan dan bahaya yang dilihatnya.

Kondisi ini sekarang semakin lazim ketimbang sebelumnya, tetapi disadari banyak program yang belum memecahkan masalah pergerakan ini. Kajian terhadap pergerakan ini sangat diabaikan. Akibatnya perencana juga mengabaikannya termasuk untuk perencana transportasi atau rute bis sekolah (Sa'ud dan Makmun, 2006:112).

Pada kondisi empiris, hampir di seluruh kota di Indonesia dihadapkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hambatan atau kendala efektivitas dan kendala optimalisasi penyelenggaraan pembelajaran, yang disebabkan oleh permasalahan transportasi yang merupakan bagian dari komponen utama struktur ruang wilayah. Dapat ditemukan di beberapa wilayah bahwa kondisi keberadaan lokasi sekolah yang tidak representatif dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Misalkan saja tata guna lahan pendidikan sekolah-sekolah yang sebagian besar yang terletak pada satu wilayah yang sama pada pusat kota atau pusat kegiatan kota. Keberadaan sekolah-sekolah yang berpusat pada satu kawasan tersebut, membentuk suatu kawasan pendidikan yang didukung pada suatu sistem jaringan jalan yang saling berdekatan, dan langsung berbatasan dengan kawasan perkantoran / pemerintahan dan *Central Business District (CBD)*.

Permasalahan yang ada relevan dengan sebuah penelitian oleh Cooner, Scott A. *et al.* (2003), yang telah melakukan sebuah penelitian dengan judul

*Operations And Safety Around Schools: Overview Of Project Activities And Findings*. Penelitian tersebut untuk mengetahui kondisi transportasi dan kawasan sekolah yang berada langsung di akses jalan raya dan dan pusat pergerakan orang dan barang yang tinggi. Ditemukan bahwa sekolah yang berada di kawasan jalan raya bukan merupakan kondisi yang ideal. Idealnya lokasi sekolah tersebut dirancang untuk kondisi jalan dengan volume rendah dengan kecepatan yang aman.

Kawasan Pendidikan atau sekolah merupakan suatu wilayah potensi bangkitan tarikan lalu lintas yaitu membuat orang melakukan perjalanan menuju tempat kegiatan tersebut. Perjalanan yang dilakukan ini tidak hanya sebatas dengan menggunakan kendaraan pribadi saja, tapi juga yang menggunakan angkutan umum atau pejalan kaki. Berdasarkan kenyataan empirik konsepsi di atas, terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas dan fasilitas jalan seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan permasalahan lalu lintas lainnya.

Dengan permasalahan yang terjadi tersebut, akan cenderung menimbulkan sisi lain permasalahan yang beruntun. Setiap hari siswa memulai pengalaman belajar siswa dengan pergerakan untuk pergi ke pusat pembelajaran, berbagai permasalahan transportasi ditemukan, seperti kondisi prasarana jalan yang macet dan kinerja lalu lintas yang rendah, berakibat menjadi satu faktor yang tidak mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tahun 2011 yang berhubungan

dengan akses sekolah, diketahui bahwa beberapa ruas jalan utama di Kota Sukabumi sudah menunjukkan angka perbandingan antara volume berbanding kapasitas (*V/C ratio*) sebesar 0,85. Nilai tersebut mengandung arti bahwa kondisi lalu lintas sudah mendekati keadaan arus yang tidak stabil, dengan kecepatan yang mulai dijaga dan dikontrol akibat terpengaruh oleh perubahan kondisi operasional jalan, beberapa fluktuasi volume lalu lintas dapat menyebabkan menurunnya kecepatan kendaraan, dan para pengemudi memiliki sedikit kebebasan dalam melakukan manuver sehingga tingkat kenyamanan pengemudi sangat rendah, serta sebagai suatu kondisi yang dapat ditoleransi hanya dalam jangka waktu relatif pendek. Dari kondisi yang menyatakan macet tersebut dapat berdampak siswa terlambat ke sekolah atau menjadi lelah tiba di sekolah karena terlalu lama di perjalanan. Kondisi empiris sekolah yang tidak didukung dengan sistem pergerakan guru dan siswa yang representatif. Sehingga muncul kendala-kendala yang mengganggu efektivitas pendidikan di sekolah.

Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah jika dari sisi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh seorang pelajar untuk perjalanan dari dan ke sekolah yang dirasa membebani. Terlebih jika siswa yang bersangkutan berdomisili jauh dari sekolah dan harus berganti beberapa kali angkutan. Bisa dilihat masih sangat sedikit daerah-daerah yang menyediakan prasarana angkutan sekolah bagi siswanya. Sehingga biaya transportasi tersebut menjadi beban tak langsung dalam pembiayaan pendidikan. Hanafie (2007:251), dalam penelitian



sebelumnya menemukan bahwa ada 83,4 % siswa sekolah pada kawasan pendidikan di Kota Sukabumi menyatakan tingkat beban biaya perjalanan yang dikeluarkan siswa ke sekolah merupakan komponen biaya yang memberatkan beban keluarga.

Masalah lain yang ada seperti dengan tingginya pergerakan lalu lintas di sekitar wilayah sekolah cenderung menambah intensitas kecelakaan lalu lintas di sekitar wilayah tersebut. Seperti halnya beberapa data yang dimuat di Kementerian Perhubungan (2008) yang menyatakan bahwa prosentase kecelakaan lalu lintas banyak terjadi pada pelajar di sekitar wilayah atau lingkungan sekolah. Di sisi lain ternyata ditemukan bahwa pelajar menjadi nilai faktor terbesar yang menyebabkan kondisi kinerja lalu lintas dan jaringan jalan turun. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya volume lalu lintas yang dibangkitkan pelajar dan permasalahan indiscipliner di jalan oleh pelajar.

Berdasarkan data Direktorat Lantas POLRI pada tahun 2008, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tercatat rata-rata 20 persen menimpa anak-anak pelajar. Banyak hal penyebabnya, mulai dari memang perilaku mereka tidak disiplin di jalan, kesalahan manusia pada titik-titik rawan kecelakaan pada akses sekolah, termasuk permasalahan angkutan yang mengangkut mereka tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Anak-anak juga sering menjadi korban perlakuan salah oleh sopir/orang dewasa, fasilitas pejalan kaki tidak dilengkapi dengan jalur yang aman, rambu-rambu lalu lintas yang kurang,

perlintasan atau penyeberangan tidak memadai dan tidak aman untuk mereka lalu ke sekolah. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor pun sering tidak dilengkapi dengan helm atau perangkat keselamatan lainnya.

Sebagai komponen dari jaringan dalam struktur ruang wilayah, transportasi sangat dibutuhkan untuk memberikan akses dan mobilitas bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, memperoleh pendidikan, rekreasi, dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Salah satu kegiatan yang berlangsung setiap hari adalah aktivitas pendidikan sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan perjalanan. Salah satu kota yang penduduknya memiliki persentase terbesar dalam melakukan perjalanan dari dan ke sekolah adalah Kota Sukabumi.

Saat ini pemerintah Kota Sukabumi memiliki Visi pembangunan sebagai kota jasa, dengan salah satu fungsi dan *icon* kota jasa adalah sebagai Kota Pendidikan. Salah satu indikator Kota Pendidikan di Kota Sukabumi adalah pesatnya pertumbuhan pendidikan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah siswa persekolahan.

Pesatnya pertumbuhan elemen pendidikan ini berakibat pada besarnya bangkitan atas pergerakan siswa. Oleh sebab itu dibutuhkan aplikasi konsep manajemen struktur ruang wilayah untuk mengimbangi permintaan kebutuhan pendidikan siswa. Penerapan manajemen struktur ruang wilayah dan kebutuhan atas jaringan yang ada di dalamnya untuk menunjang sekolah, telah diterapkan di

negara-negara maju seperti Amerika dikenal dengan konsep *School Transport Management*. Tujuan pengelolaan transportasi untuk sekolah adalah meningkatkan efektivitas pendidikan yang didukung dengan efisiensi sistem transportasi serta mengurangi permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, biaya, serta dampak lingkungan. Oleh karena untuk mendukung visi Kota Sukabumi sebagai kota jasa, maka dibutuhkan penelitian mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan berupa penyediaan infrastruktur jaringan transportasi untuk Sekolah. Sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Sukabumi. Pemilihan jenjang sekolah pada pendidikan menengah di sini dengan pertimbangan bahwa pola di Kota Sukabumi, belum ada kebijakan penataan lokasi sekolah berdasarkan jangkauan pelayanan pendidikan. Sehingga kecenderungan yang terbentuk adalah sekolah pendidikan menengah bertumpuk pada lokasi kawasan perkotaan. Berbeda dengan kondisi untuk pendidikan dasar yang sudah menggunakan pendekatan distribusi lokasi berdasarkan pendekatan kewilayahan.

SMA/SMK/MA merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anak Indonesia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara formal. Jenjang ini menjadi tahap yang strategis dan kritis bagi perkembangan dan masa depan anak Indonesia. Pada tahapan ini, anak Indonesia berada pada pintu gerbang untuk memasuki dunia pendidikan tinggi yang merupakan wahana untuk membentuk integritas profesi yang diharapkan. Pada tahap ini pula, anak

Indonesia bersiap untuk memasuki dunia kerja yang penuh tantangan dan persaingan.

Pertimbangan penyediaan dukungan infrastruktur perkotaan berupa sarana dan prasarana transportasi untuk Sekolah Pendidikan Menengah ini didasari bahwa keberadaan sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah atas tidak berorientasi pada kedekatan pemukiman seperti yang cenderung diterapkan dalam hal penempatan lokasi sekolah untuk SD/MI atau SMP/MTs. Tempat tinggal siswa pada jenjang SMA/SMK/MA cenderung berasal dari lokasi yang jauh dan sangat membutuhkan perhatian yang khusus terhadap ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pergerakan pendidikan yang dilaksanakan.

Hal ini menjadi sangat ironis ketika dilihat kondisi empiris secara kasaf mata maupun dengan membandingkan antar kondisi ideal secara harapan dan teoritis belum tampak adanya penanganan secara komprehensif elemen pemerintah dan masyarakat, dalam menciptakan struktur ruang wilayah yang mendukung pendidikan. Dari gambaran latar belakang permasalahan di atas, dapat digambarkan begitu pentingnya upaya penciptaan kondisi lingkungan dan fasilitas pendidikan, berupa kondisi kebijakan struktur ruang wilayah perkotaan yang representatif dalam menunjang efektivitas pendidikan.

Sementara untuk tinjauan dalam kaitan kerangka otonomi daerah di sini, dapat dilihat bahwa makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 menunjukkan secara jelas, bahwa Otonomi Daerah merupakan bentuk membebaskan dari segala bentuk ketergantungan, yang berarti terbentuknya kemandirian daerah dalam mengatur rumah tangganya, sehingga di daerah dituntut adanya peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan, pemerataan dan keadilan, demokratisasi serta penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi juga keragaman daerah masing-masing.

Dalam konteks itulah otonomi daerah diarahkan mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu adanya posisi kuat masyarakat di daerah, sedangkan pemerintah hanya sebagai katalisator, dinamisator dan fasilitator guna memberdayakan sumber-sumber daya publik dengan berbagai kepentingan. Dengan demikian maka otonomi daerah diharapkan akan mengarah kepada pencapaian kinerja yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada setiap warga Negara, seperti halnya pelayanan pendidikan.

Bertolak dari kaidah-kaidah ilmiah, pemikiran dan kondisi empirik tentang lokus penelitian tersebut menjadi bersenyawa dalam mbingkai tema sentral penelitian dengan judul : **Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Terhadap Efektivitas Pendidikan Siswa Persekolahan (Studi pada Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Sukabumi).**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berpijak pada apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini tidaklah untuk mengkaji seluruh masalah yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui kebijakan terhadap struktur ruang wilayah. Permasalahan utama yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan struktur ruang wilayah terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan dan pengaruhnya terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan“.

Yang dimaksud dengan Struktur Ruang di sini adalah mengacu kepada defnisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Untuk penjelasan dan pembatasan lebih lanjut dari definisi struktur ruang wilayah akan dibahas pada pembatasan masalah dan tinjauan pustaka.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan dimaksud tersebut, serta mencari bagaimana bentuk rekomendasi yang tepat melalui dukungan manajemen struktur ruang wilayah yang dibutuhkan, seperti dengan penyediaan sarana transportasi dan prasarana jalan untuk jenjang

pendidikan Sekolah Pendidikan Menengah yang dibutuhkan dalam menunjang efektivitas pendidikan, dengan Kota Sukabumi sebagai wilayah studi.

Pemahaman yang terungkap pada latar belakang penelitian di atas menunjukkan kondisi struktur ruang wilayah dilihat dari segi esensi sarana/prasarana penunjang sekolah, sangat dibutuhkan dalam menunjang efektivitas pendidikan. Komponen-komponen tersebut secara empirik mengisyaratkan dan mengundang permasalahan.

Mengingat rumusan masalah tersebut masih sangat umum maka perlu dirinci rumusan masalah tersebut melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tata guna lahan terhadap efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*)?
2. Bagaimana pengaruh jaringan jalan terhadap efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*)?
3. Bagaimana pengaruh moda transportasi terhadap efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*)?
4. Bagaimana pengaruh fasilitas lalu lintas terhadap efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*)?
5. Bagaimana pengaruh tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi dan fasilitas lalu lintas secara bersama-sama terhadap efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*)?

6. Bagaimana pengaruh tata guna lahan sekolah terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?
7. Bagaimana pengaruh jaringan jalan terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?
8. Bagaimana pengaruh moda transportasi terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?
9. Bagaimana pengaruh fasilitas lalu lintas terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?
10. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*) terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?
11. Bagaimana pengaruh tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas lalu lintas dan efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*) secara bersama-sama terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sebagai maksud penelitian dari disertasi ini adalah untuk mengevaluasi, mengkaji, menganalisis, membangun konsep dan merencanakan kebijakan struktur ruang wilayah dalam menunjang capaian efektivitas pendidikan pada Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Sukabumi, berdasarkan kondisi empiris, permasalahan, kebutuhan dan standar baku yang dipergunakan. Dalam kondisi



tersebut, Sekolah Pendidikan Menengah memiliki karakteristik khusus jika dibanding dengan tingkatan atau jenjang pendidikan yang lain, sehingga dibutuhkan suatu model khusus sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang variabel-variabel penataan ruang wilayah dan pengelolaan infrastruktur perkotaan, yang memberikan pengaruh kepada efektifitas sistem pergerakan pendidikan, bagaimana keeratan dan pola hubungan antar variabel, serta implikasinya terhadap efektifitas pendidikan siswa persekolahan, dengan penelitian terhadap Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Sukabumi. Untuk itu tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tata guna lahan terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*).
2. Untuk mengetahui pengaruh jaringan jalan terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*).
3. Untuk mengetahui pengaruh moda transportasi terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*).
4. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas lalu lintas terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*).
5. Untuk mengetahui pengaruh tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi dan fasilitas lalu lintas secara bersama-sama terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*).

6. Untuk mengetahui pengaruh tata guna lahan sekolah terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.
7. Untuk mengetahui pengaruh jaringan jalan terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.
8. Untuk mengetahui pengaruh moda transportasi terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.
9. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas lalu lintas terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.
10. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*) terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.
11. Untuk mengetahui pengaruh tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas lalu lintas dan efektivitas sistem pergerakan pendidikan (*educational movement system*) secara bersama-sama terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan.

#### **D. Pembatasan Masalah Penelitian**

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik dan tepat, serta fokus dan terarah dalam pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah yang dilakukan dapat

dilihat dari dua sisi, yaitu secara konseptual dan kontekstual, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Pembatasan Konseptual Masalah

- a. Struktur ruang wilayah yang menjadi cakupan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan memuat definisi bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, yang setidaknya harus memiliki unsur: lokasi, bentuk, luas, dan fungsi. Sehingga dalam pembatasan masalah di sini, membatasi keberadaan sekolah dalam struktur ruang wilayah yang ada di sekitarnya dan juga akses yang menghubungkan pergerakan siswa dari tempat tinggal menuju sekolah atau sebaliknya.
- b. Variabel yang berhubungan dengan struktur ruang wilayah berupa pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, dibatasi dalam penelitian hanya pada kajian Tata Guna Lahan, Jaringan Jalan, Moda Transportasi dan Fasilitas Lalu Lintas. Definisi lebih lanjut akan dibahas pada Bab 2, Sub bab Struktur Ruang Wilayah.

- c. Sistem pergerakan pendidikan (*Educational movement system*) dalam penelitian ini dibatasi dalam pemahaman sebagaimana yang dibahas oleh Banghart dan Trull (1973:125-127), sebagai sebuah sistem motivator utama dalam penentuan lokasi untuk variasi aktivitas pendidikan dan pergerakan murid dan yang lain dalam variasi seksi pada area pendidikan. Sistem pergerakan pendidikan di sini juga dibatasi dan dimaksudkan sebagai sistem yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan menetapkan lokasi dari berbagai jenis aktivitas pendidikan dan mengizinkan perpindahan siswa dan bagian-bagian yang lainnya dalam wilayah pendidikan, serta berkaitan dengan masalah transportasi yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- d. Dalam pengertian teoritis atau praktis, sangat universal para ahli dalam memahami maksud dari efektivitas, sehingga dalam penelitian ini perlu dibatasi yang dimaksud dengan efektivitas pendidikan siswa persekolahan adalah yang mengacu pada pengertian efektivitas atas tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan secara optimal dalam bidang pendidikan, yang dibatasi pada usaha untuk mewujudkan

dan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik melalui persekolahan.

- e. Aspek-aspek yang dibahas dari variabel-variabel yang diteliti lebih fokus dan dibatasi dari sisi keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan, efisiensi biaya dan aksesibilitas.

## 2. Pembatasan Kontekstual Masalah

- a. Sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Sukabumi. Pemilihan jenjang sekolah pada pendidikan menengah di sini dengan pertimbangan bahwa pola di Kota Sukabumi, belum ada kebijakan penataan lokasi sekolah berdasarkan jangkauan pelayanan pendidikan. Sehingga kecenderungan yang terbentuk adalah sekolah pendidikan menengah bertumpuk pada lokasi kawasan perkotaan. Berbeda dengan kondisi untuk pendidikan dasar yang sudah menggunakan pendekatan distribusi lokasi berdasarkan pendekatan kewilayahan.
- b. Data primer dan sekunder yang dipergunakan, diperoleh berdasarkan kondisi empiris data lapangan maupun sumber referensi yang dimiliki oleh institusi terkait pada tahun 2011 dan 2012 pada saat pengumpulan data.
- c. Untuk memperkaya lebih mendalam pembahasan permasalahan pendidikan ini, juga dilakukan analisis menggunakan pendekatan yang

mengacu pada standar teknis dan pedoman ilmiah : (1) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan; (2) Penataan struktur ruang wilayah; dan (3) Manajemen transportasi, yang meliputi *planning transport*, *public transport* dan *traffic engeneering*.

### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian dari disertasi ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagaimana berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti di bidang keilmuan administrasi pendidikan, khususnya kajian kebijakan pendidikan, terutama berkaitan dengan kondisi struktur ruang wilayah yang menunjang efektivitas pendidikan siswa persekolahan. Temuan-temuan penelitian dapat digunakan sebagai model, atau dapat digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen pendidikan. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi positif untuk pengembangan studi administrasi pendidikan, yang merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dari ruang lingkup kebijakan pemerintah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis kiranya penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam merancang atau sebagai landasan kebijakan lebih lanjut

melakukan manajemen pendidikan, serta dalam hal pengembangan kebijakan sistem penataan struktur ruang wilayah, agar terjadi sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penataan wilayah yang nyaman, aman, sehat dan ekonomis bagi masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan penelitian ini lebih terfokus atau terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan, memuat konsep yang mengawali dasar berpikir dan harapan umum dari penelitian ini. Sehingga di dalam Bab ini lebih bersifat menguraikan dasar-dasar permasalahan dari kondisi empiris yang ada untuk layak dilakukan penelitian. Dengan luas bahasan yang ada, maka di dalam Bab ini juga dilakukan penekanan fokus pembahasan baik secara konseptual maupun kontekstual, dengan memuat uraian identifikasi dan perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, pembatasan masalah penelitian, manfaat / signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II       Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, yang berisikan arti penting dan teoritis yang mendukung kajian tentang studi evaluasi implementasi kebijakan struktur ruang wilayah terhadap efektifitas sistem pergerakan pendidikan dan pengaruhnya

terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan, didukung dengan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan, serta membuat fokus teori dan bahasan penelitian kerangka pemikiran, anggapan dasar dan hipotesis.

- Bab III Metode Penelitian, yang berisikan tentang rancangan penelitian, metode pengambilan sampel, serta hal-hal yang berhubungan dengan metode yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data dalam melakukan analisis data penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran singkat obyek yang diteliti, temuan penelitian, serta bahasan-bahasan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan, serta mengangkat catatan terhadap penanganan permasalahan-permasalahan yang ada.
- Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan beberapa saran-saran sebagai masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan di masa mendatang.